

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Era industri 4.0 telah memberikan banyak pergeseran di berbagai sektor pemerintahan, khususnya di dalam sistem pengelolaan Pemerintahan Daerah. Pergeseran ini tentunya memberikan dampak yang cukup baik bagi Pemerintah, misalnya pelayanan akan lebih efisien dan efektif. Penyusunan anggaran dan laporan keuangan akan terasa mudah karena adanya komputerasi sehingga pelaporan kinerja Pemerintah akan lebih transparan dan akuntabel karena telah dimuat dalam web Pemerintah dan dapat diakses oleh berbagai pihak khususnya masyarakat. Komputerasi memungkinkan Pemerintah Daerah memaksimalkan potensi yang dimiliki di dalamnya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang lebih berpihak kepada kepentingan-kepentingan masyarakat.

Komputerasi merupakan dampak dari implementasi desentralisasi fiskal di pemerintahan Indonesia, secara perlahan dan teratur tata kelola keuangan Pemerintah Daerah yang semula terpusat beralih ke tata kelola keuangan yang terdesentralisasi. Pengadaan desentralisasi merupakan solusi dari usaha yang kuat dengan tujuan memberikan kemakmuran dan keadilan sosial rakyat Indonesia (Bintang dan Mujibussalim, 2019).

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah yang cukup luas untuk mengatur keuangan rumah tangganya

sendiri, baik dengan bentuk kegiatan meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah, merumuskan strategi dan prioritas anggaran dalam rangka peningkatan kualitas dalam pembangunan daerah, desentralisasi sangat penting untuk memastikan kesiapan sumber-sumber keuangan daerah untuk menyelenggarakan program-program dan berbagai kegiatan peningkatan kualitas dan pembangunan yang diperlukan oleh masyarakat daerah. Penyelenggaraan kinerja yang baik menggambarkan adanya orientasi dari Pemda untuk menuju kepada *good government*. Artinya semakin baik kinerja suatu pemerintah maka semakin baik Kualitas Pelaporan Keuangan dan Akuntabilitas Pemda (Mudhofar & Tahar, 2016). Desentralisasi mengakibatkan banyak masalah dikarenakan setiap daerah mempunyai batasan pengetahuan dan kekuatan yang berbeda dilihat dari berbagai sisi seperti keuangan, ketersediaan infrastruktur yang dimiliki dan kualitas pengetahuan serta pengalaman manusianya (Fontanella, 2014).

Desentralisasi menjadi acuan penerapan otonomi daerah, otonomi daerah mencakup hak, wewenang Pemerintah, kewajiban yang di berikan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur atau mengelola urusan yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Bintang dan Mujibussalim, 2019).

Pengelolaan keuangan sepenuhnya diberikan kepada Pemerintah Daerah, dalam pelaksanaanya Pemerintah Daerah diwajibkan untuk

mengelola keuangan secara tertib, transparan, akuntabel serta dikelola dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di pemerintahan khususnya di Indonesia, dengan tujuan agar terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, usaha untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih maka Pemerintah Daerah wajib menyusun Laporan Keuangan Daerah. Desentralisasi dapat mempersempit gerak pelaku pelanggaran administratif yang fatal dan beberapa menutup lingkup secara ekstensif oleh pelaku politik atau pejabat yang melakukan penyalahgunaan wewenang (Unger & Mahakanjana, 2016).

UU No. 17 Tahun 2003 pasal 31 dan pasal 32 tentang keuangan Negara, tertulis bahwa:

“Pusat pertanggungjawaban di daerah Provinsi, Kabupaten, atau kota memaparkan dan menyampaikan pertanggungjawabannya terhadap pelaksanaan APBD kepada DPRD yang berwujud Laporan Keuangan yang sebelumnya sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran telah usai (bulan juni tahun berjalan). Inti dari laporan keuangan tersebut berwujud laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, yang pembuatannya telah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku”.

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan bahwa opini diberikan kepada Lembaga Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018

dari hasil kegiatan pemeriksaan yang dilakukan atas 86 Laporan Keuangan Kementrian Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2018. Dari 87 Laporan keuangan yang telah disebutkan, 81 LKKL dan 1 LKBUN berhak mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) namun masih ada 4 LKKL memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Selain itu, masih ada 1 LKKL yang memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2017, pada Tahun 2017 sebanyak 79 LKKL dan 1 LKBUN memperoleh opini WTP dan masih terdapat 6 LKKL memperoleh opini WDP dan 2 LKKL mendapat opini TMP (Dalam & Tangga, 2018).

Lembaga yang belum mendapatkan opini WTP tersebut dikarenakan masih terdapat masalah kas dan setara kas, belanja dibayar dimuka, belanja barang, belanja modal, persediaan, aset tetap, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tak berwujud. Tetapi masalah tersebut secara keseluruhan tidak berdampak secara material pada kesesuaian LKPP Tahun 2018 terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan.

Fakta lain yang diperoleh dari evaluasi oleh BPK mencerminkan bahwa lembaga yang belum mendapatkan opini WTP penyebabnya masih ada kelemahan yaitu dalam pengelolaan laporan keuangan yang belum sesuai dengan aturan perundang-undangan. Dari temuan tersebut BPK telah mengevaluasi masalah-masalah yang berhubungan dengan laporan Keuangan, yaitu:

1. Kegiatan pencatatan tidak sesuai dan akurasi belum dapat dikatakan baik.
2. Proses pembuatan laporan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Penyampaian laporan belum tepat dengan waktu ditentukan.
4. Sistem Informasi Akuntansi yang digunakan serta pelaporannya kurang baik.
5. Sistem Informasi Akuntansi yang digunakan belum di *support* dengan Sumber Daya Manusia yang terlatih dan profesional. Mengindikasikan bahwa Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih belum optimal (BPK, 2018).

Manfaat utama dalam Laporan Keuangan yang dibuat contohnya seperti unit-unit atau bidang-bidang organisasi publik adalah untuk memberikan informasi yang berguna dan dapat digunakan bagi penyedia anggaran serta pengguna lainnya, baik yang mengalir maupun yang terpendam, untuk mengambil suatu tindakan yang baik berkaitan dengan alokasi dana ke organisasi tersebut (Surjono, 2018).

Bentuk tata kelola pemerintahan yang baik salah satunya dengan tingkat Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah juga baik dan dapat dipahami oleh penggunanya, maka dari itu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sangat penting karena dapat memberikan dampak yang positif, bermanfaat dalam upaya pengambilan keputusan dan menentukan kebijakan suatu pemerintahan di waktu yang akan datang, ini

juga dapat memberikan dampak kepada peningkatan percepatan pembangunan dan penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh Pemerintah seperti kemiskinan dan Kualitas Sumber Daya Manusia masyarakat yang belum berkompeten. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah membutuhkan Sumber Daya Manusia yang memadai, dapat memahami dan kompeten di bidang akuntansi pemerintahan, untuk membuat dan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Wahyuni *et al.*, 2018).

Opini yang diberikan oleh BPK dapat dijadikan pengukur Pemerintah Daerah dalam menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, ada tingkatan penilaian yang diberikan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dari hasil audit yang dilakukan oleh BPK tingkatan tertinggi adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), selanjutnya Wajar dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan yang terendah yaitu Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat juga dilihat dari penyusunan Laporan Keuangannya apakah sudah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), penyusunannya apakah menggunakan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, dalam informasi keuangan tidak terindikasi menyimpang dari aturan perundang-undangan yang berlaku dan penyajiannya tidak melampaui batas waktu yang telah ditentukan. Kriteria dan unsur yang membentuk kualitas laporan keuangan dalam peraturan

pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah terletak di kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, yaitu:

- 1) Relevan
- 2) Andal
- 3) Dapat dibandingkan
- 4) Dapat dipahami

Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Letak geografis Kabupaten Bantul yaitu antara $07^{\circ} 44' 04''$ - $08^{\circ} 00' 27''$ LS dan $110^{\circ} 12' 34''$ - $110^{\circ} 31' 08''$ BT. Kabupaten Bantul memiliki luas daerah $506,85 \text{ Km}^2$ (15,90 % dari luas wilayah Propinsi D.I.Y) dengan karakteristik sebagian diantaranya dataran rendah 140% dan (60%) daerah kurang subur dan perbukitan, secara rata-rata bagian barat adalah daerah agak menurun rendah dan perbukitan yang terbentang dari utara ke selatan dengan luas mencapai $89,86 \text{ Km}^2$ (17,73% dari seluruh wilayah), di tengah yaitu daerah yang datar serta landai dan tergolong sebagai daerah pertanian yang memiliki tanah yang subur luasnya mencapai $210,94 \text{ Km}^2$ (41,62% dari seluruh wilayah).

Daerah timur yaitu daerah yang landai, tidak rata dan sedikit terjal namun keadaanya lebih baik dari daerah sebelah barat, luasnya mencapai $206,05 \text{ Km}^2$ (40,65% dari seluruh wilayah). Sebelah selatan yaitu sesungguhnya masuk bagian dari daerah tengah dan keadaan lingkunganya

berpasir, terbentang sepanjang pantai selatan Kecamatan Srandakan, Kretek, dan Sanden (Bantul, 2018). Saat ini tata guna lahan yaitu:

1. Pemukiman yang memiliki luas kurang lebih 3.927,61 Ha (7,75%).
2. Sawah yang memiliki luas kurang lebih 15.879,40 Ha (31,33%).
3. Tegalan yang memiliki luas kurang lebih 6.625,67 Ha (13,07%).
4. Hutan yang memiliki luas kurang lebih 1.385 Ha (2,73%).
5. Kebun campuran yang memiliki luas kurang lebih 16.599,84 (32,75%).
6. Tanah tandus yang memiliki luas kurang lebih 543 (1,07%).
7. Lain-lain dari yang telah disebutkan memiliki luas kurang lebih 5.724,48 (11,30%).

Kabupaten Bantul memiliki 17 kecamatan dan memiliki 75 Desa dan 933 Dusun. Sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku, audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di lakukan di setiap periodenya dan di periksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pada tahun anggaran 2018 audit juga dilakukan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul yang dilaksanakan mulai dari tanggal 2 April 2019.

Tujuan dari audit tersebut dilaksanakan yaitu untuk memberikan opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang merupakan cerminan serta penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan khususnya bagian keuangan di Kabupaten Bantul. Hasil pemeriksaan tersebut Kabupaten Bantul memiliki hak untuk mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) opini ini dapat dikatakan sebagai tingkatan yang

terbaik dalam opini pemeriksaan. Kabupaten Bantul dapat mempertahankan prestasi ini tujuh tahun berturut-turut. Namun masih ada beberapa hasil temuan yang seharusnya diberi penekanan dengan tujuan agar terwujud pengelolaan keuangan yang lebih tertib, efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel di Kabupaten Bantul pada masa yang akan datang. Pemahaman bahwa Akuntabilitas dan Kualitas Laporan Keuangan Daerah dapat dicapai dengan keadilan secara prosedural sehingga dapat diciptakan di dalam birokrasi (Petra et al., 2009).

Badan Pemeriksa Keuangan menemukan indikasi tidak patuhnya Pemerintah Daerah terhadap peraturan perundang-undangan dalam kegiatan pengelolaan keuangan Negara yaitu:

1. Belum sepenuhnya menggunakan SiRUP dalam pembuatan rencana pengadaan.
2. Kekurangan volume pekerjaan atas pekerjaan pembangunan gedung di berbagai dinas.
3. Kekurangan volume atas pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan kawasan pemukiman (BPK, 2018).

Pembahasan mengenai kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang terkait dengan penyusunan anggaran sesuai dengan yang dijelaskan di dalam Al-Quran yaitu dalam Qur'an Surah An-Nisa [4]: 135 yang berbunyi:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ
عَنِيًّا أَوْ فَخِيرًا فَأَلَّهِ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu dan bapak dan kerabatmu. Jika (dia yang terdakwa) kaya atau miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatannya (kebaikannya) maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala yang kamu kerjakan”.

Telah dijelaskan ayat tersebut bahwasannya Allah SWT menyerukan kepada hamba-Nya agar dalam berbuat sesuatu selalu menegakkan keadilan. Dalam melakukan penyusunan anggaran harus dilakukan secara adil dan merata sesuai dengan kepentingan masyarakat. Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penggunaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dapat memiliki dampak dan mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian sebelumnya juga telah dilakukan hasilnya menyebutkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

hasilnya berpengaruh secara signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Rahmawati, 2015).

Menilai Sumber Daya Manusia dengan berbagai keterampilan, dan kelebihan adalah tugas yang sulit untuk memilih di antara mereka. Sekarang, pakar pengguna *cloud* memberi peringkat SDM dilihat berlandaskan dari kualitas dan kriteria secara kualitatif dan diperlukan juga langkah penilaian yang baru sebelum memberi penilaian kualitas serta mendahulukan layanan *human resources* yang telah diusulkan (Jafari *et al.*, 2017). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh Kompetensi SDM, Pemahaman Akuntansi, Penerapan Dan Penggunaan SAP, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal (Wahyuni *et al.*, 2018).

Hasil dari penelitian yang dilakukan sebelumnya memperlihatkan bahwa Kompetensi SDM, Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal mempunyai dampak dan pengaruh yang signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, namun variabel independen lain yaitu Penerapan dan Penggunaan SAP tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dapat dikatakan bahwa Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu seperti kompetensi SDM, Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Komitmen

Organisasi, penelitian ini hanya mengambil beberapa faktor yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Penelitian ini tidak menggunakan beberapa faktor yang telah dibahas sebelumnya yaitu faktor Pemahaman Akuntansi, disebabkan karena Pemahaman Akuntansi merupakan masih di dalam bagian dari Kompetensi SDM. Kompetensi SDM yaitu kemampuan seorang individu dalam melaksanakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab, namun di dalam penyusunan Laporan Keuangan, Kemampuan SDM yang dimaksud sebelumnya adalah Pemahaman Akuntansi.

Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki kompetensi yang selaras dan sesuai dapat memahami dan mengerti logika dalam akuntansi secara baik dan sesuai. Belum dapat tercapainya Sumber Daya Manusia dalam pemahaman logika akuntansi salah satu penyebabnya yaitu Sumber Daya Manusia yang masih kurang dalam pemahaman dasar dan pembekalan dengan cara pendidikan, pelatihan, serta pengalaman yang masih kurang khusus di bagian keuangan. Kompetensi Sumber Daya Manusia penting menunjang kegiatan memproses dan mengelola informasi keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (Pujanira & Taman, 2017).

Selain dari SDM, Pemanfaatan dan Penggunaan Teknologi Informasi mempunyai pengaruh tidak kecil terhadap penyusunan dan

penyajian serta Kualitas Laporan Keuangan yang paling utama pada keterandalan dan tepat waktu dalam penyajian Laporan Keuangan. Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki pengaruh yang besar terhadap tepat waktu pada pelaporan keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi yang benar-benar mampu menjelaskan variabel ketepatan waktu (Yuniatin *et al.*, 2017).

Penelitian ini telah dilakukan sebelumnya oleh Puri dan Dwi (2015) dan (Hanafi, 2013) yang hasilnya bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi yaitu merupakan kegiatan pemanfaatan seperangkat alat yang dapat meringankan dan mempermudah dalam menciptakan keluaran, memperbaiki atau memanipulasi, menyimpan, dan memaparkan suatu informasi. Kewajiban pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi dalam hal ini telah ditetapkan oleh Pemerintah di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 (2005) yaitu tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

“Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan public”.

Pemanfaatan dan Penggunaan Teknologi Informasi sangat dibutuhkan untuk mempercepat kegiatan olah data transaksi dan

pemaparan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sehingga Laporan Keuangan tersebut dapat disajikan tepat waktu. Pemanfaatan Teknologi Informasi yang tepat dapat berpengaruh membantu dan memperlancar proses keandalan Laporan Keuangan Daerah (Mildamayanti *et al.*, 2018). Berlandaskan dari data dan penjelasan tersebut menarik dan menantang untuk dilakukan penelitian lebih dalam lagi terkait Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul dan apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Alasan peneliti mengambil tempat penelitian di Kabupaten Bantul karena di kabupaten ini masih banyak hal-hal yang masih menjadi koreksi dari BPK dan kualitasnya belum sebaik Kabupaten Sleman dan Pemda D.I. Yogyakarta.

Penelitian sangat penting karena dengan penelitian ini dapat mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah yang belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan dapat digunakan sebagai referensi memperbaiki Kualitas Laporrannya menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penjelasan tersebut, menjadi dasar peneliti ini yang menggunakan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi di Kabupaten Bantul).

B. Batasan Masalah

Penelitian ini terbatas pada Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Laporan Keuangan Daerah, dan subjek penelitian ini terbatas pada pegawai di organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bantul khususnya bagian keuangan sehingga apabila ada perbedaan antara hasil pembahasan dengan kesimpulan hal itu dikarenakan dampak dari variabel dan subjek serta objek penelitian yang berbeda.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia dapat berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Pemerintah Daerah?
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Pemerintah Daerah?
3. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Pemerintahan Daerah?

D. Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah yang dijelaskan tersebut, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk menguji pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Pemerintah Daerah.
2. Untuk menguji pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Laporan Keuanngan Pemerintah Daerah.

3. Untuk menguji pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

E. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif, baik secara teoritis maupun praktis bagi berbagai pihak, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur akuntansi yaitu dalam bidang sektor publik terkait dengan Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penyusunan penelitian pada masa yang akan datang terkait dengan topik yang sama dan sesuai.

Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi bahan analisa dan pertimbangan untuk mengambil suatu keputusan dan meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi sehingga Pemerintah Daerah dapat melakukan perbaikan-perbaikan guna menghasilkan kinerja yang lebih maksimal.

Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi yang bermanfaat bagi masyarakat terkait Kualitas Laporan Keuangan

Organisasi Pemerintah Daerah yang dibuktikan secara empiris tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Penggunaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

